

Vol 7, No 1	2023	Halaman 134 - 151
-------------	------	-------------------

Implementasi Pemerintahan Terbuka Indonesia melalui Saluran YouTube Resmi Sekretariat Presiden

Indah Restasari Agustina
Universitas Indonesia
indah.restasari@ui.ac.id

English Title: Implementation of Indonesian Open Government via Presidential Secretariat Official Youtube Channel

Received: 23-12-2023, Revised: 03-03-2023, Acceptance: 13-03-2023

Abstract

Open government initiatives are various efforts that can make government more accessible to everyone which will increase the legitimacy of government in the public's eyes. The logic of social media that offers connectivity, programmability and popularity can be very useful for supporting government transparency, participation and collaboration with its citizens. The Indonesian government also implemented the application of social media in the context of realizing this for the community by opening the Presidential Secretariat's YouTube channel in 2019. This channel shares information in the form of video content related to government performance and current issues. This study then aims to provide an explanation regarding the application of YouTube as an implementation of open government in Indonesia. The research was conducted qualitatively and used a descriptive case study approach with the unified theory of open government and social mediatization initiated by Lim, et. Al. (2022) as a framework. The data was obtained through semi-structured interviews with three graduate students of communication science at the University of Indonesia who are also State Civil Apparatuses (ASN) in the field of public relations as well as other supporting literature. The results of the study show that the Presidential Secretariat's YouTube channel is one of the tools that empowers open government and enables the availability of information and openness to the public. Participation and collaboration are limited because this YouTube channel still uses one-way communication, lack of feedback from channel managers, and the background of Indonesian society which is still experiencing digital divide. Nevertheless, the application of the Presidential Secretariat channel in the initiation of open government is in line with the government's public relations objectives, namely as a means of disseminating credible and transparent information.

Keywords: *Open Government, Social Mediatization, YouTube, Presidential Secretariat*

Abstrak

Inisiasi pemerintahan terbuka adalah berbagai upaya yang dapat membuat pemerintah lebih mudah diakses oleh semua orang yang akan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik. Logika media sosial yang menawarkan konektivitas, programabilitas, dan popularitas dapat sangat bermanfaat untuk mendukung transparansi, partisipasi, dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakatnya. Pengaplikasian media sosial dalam rangka mewujudkan keterbukaan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membuka saluran YouTube Sekretariat Presiden pada 2019. Saluran ini membagikan informasi berupa konten video terkait kinerja pemerintah serta isu-isu terkini. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengaplikasian YouTube sebagai implementasi pemerintahan terbuka di Indonesia. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif dengan teori terpadu pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial yang digagaskan oleh Lim, et. al. (2022) sebagai kerangka berpikir. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada tiga mahasiswa pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kehumasan serta berbagai literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran YouTube Sekretariat Presiden menjadi salah satu sarana yang memberdayakan pemerintahan terbuka serta memungkinkan terjadinya ketersediaan informasi dan transparansi bagi publik. Partisipasi dan kolaborasi menjadi terbatas dikarenakan saluran YouTube ini masih menggunakan komunikasi satu arah, kurangnya umpan balik dari pengelola saluran, dan latar belakang masyarakat Indonesia yang masih mengalami kesenjangan digital. Meskipun demikian, pengaplikasian saluran Sekretariat Presiden dalam inisiasi pemerintahan terbuka sudah sesuai dengan tujuan kehumasan pemerintah, yakni sebagai sarana diseminasi informasi yang kredibel dan transparan.

Kata Kunci: Pemerintahan Terbuka, Mediatisasi Sosial, YouTube, Sekretariat Presiden.

PENDAHULUAN

Kemudahan yang diberikan oleh media sosial bagi penggunaannya telah merevolusi cara manusia berkomunikasi satu sama lain. Media sosial secara luas didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk tujuan interaksi dan keterlibatan sosial (Bertot et al., 2010). Berdasarkan penggunaannya, media sosial diklasifikasikan dalam dua kategori (Kotler et al., 2019). Kategori pertama adalah media sosial yang digunakan dengan tujuan ekspresif sehingga penggunaannya dapat mengekspresikan dirinya melalui foto, musik, teks, dan video yang dapat diunggah dan dibagikan kepada orang lain. Kategori ini terdiri dari platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Kategori kedua yaitu media sosial yang digunakan dengan tujuan kolaboratif untuk mencapai tujuan yang berorientasi pada pekerjaan, seperti Zoom, Google Workspace, dan SharePoint. Berbagai kegunaan media sosial tersebut diakui oleh organisasi dan praktisi hubungan masyarakat di berbagai industri (Graham, 2014).

Penggunaan media sosial pada sektor publik dianggap sebagai inovasi teknologi dan agen transformasi (Chun & Reyes, 2012) serta dapat membuka kemungkinan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya (Lee & Kwak, 2012). Media sosial yang memiliki karakteristik terbuka, partisipatif, dan sebagai forum untuk berbagi dapat menjadi sarana yang penting dalam memwadahi interaksi antar pemerintah, pemerintah dan masyarakat, serta agensi pemerintah dan swasta (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia, 2012). Media tradisional hanya menawarkan kontak satu arah (*one-way*), seperti pemerintah ke publik, sedangkan media sosial memiliki struktur yang menyediakan kontak ke berbagai arah (*multi-way*), seperti pemerintah ke publik, publik ke pemerintah, dan di antara pemerintah, dimana kategori media sosial dengan tujuan ekspresif merupakan yang paling menonjol di ruang publik (Lim et al., 2022). Sebagai salah satu sarana dari strategi komunikasi yang dinamis dan transparan, media sosial yang telah mengubah praktik hubungan masyarakat telah memicu kesadaran berbagai negara di dunia akan signifikansi pemerintahan terbuka (*open government*) sebagai alat yang ampuh untuk mereformasi administrasi dan mentransformasi tata kelola pemerintahan (Gil-Garcia et al., 2020).

Pemerintahan terbuka dipuji sebagai paradigma dari pemerintahan baru (OECD, 2016b) yang memberikan potensi bagi warga negara untuk menjadi lebih terinformasi dan terlibat dalam pemerintah dengan pesatnya penyebaran teknologi informasi dan komunikasi (Schnell, 2020). Pentingnya partisipasi warga negara dalam rancangan dan implementasi kebijakan publik yang lebih baik telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk ikut berinvestasi dalam beragam strategi yang mendorong keterbukaan (Gil-Garcia et al., 2020). Hal ini diinisiasi dengan peluncuran *The Open Government Partnership* pada 20 September 2011 di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB. Kepala Negara dari 8 negara pendiri, yakni Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat berkomitmen untuk menerapkan prinsip keterlibatan warga, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, kualitas demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi (OECD, 2016b). Meskipun pemerintahan terbuka merupakan konsep yang kompleks untuk dipahami karena keterkaitannya dengan fenomena sosio-teknis dalam berbagai disiplin ilmu, terdapat beberapa elemen pemerintahan terbuka yang secara konsisten diamati dalam berbagai literatur, yaitu ketersediaan informasi, transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan teknologi (Gil-Garcia et al., 2020).

Konsep pemerintahan terbuka telah diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti pemerintah lokal Meksiko dan Spanyol yang menerapkan transparansi serta partisipasi warga sebagai gagasan utamanya (Ruvalcaba-Gomez et al., 2022). Di Spanyol sendiri, pemerintah lokal Andalusia telah membangun ruang partisipasi dan kolaborasi publik, meskipun sebagian besar penerapan ini masih berada dalam tahap yang sangat awal (Muñoz et al., 2022). Pemerintah lokal lainnya di Spanyol, yakni Madrid yang meluncurkan kebijakan ambisius untuk mendorong transparansi dan partisipasi juga masih menghadapi tantangan yang kompleks dikarenakan model kebijakan pemerintahan terbuka yang belum diadopsi oleh warga, proses pembuatan keputusan oleh pemerintah yang terlalu lama, dan

kualitas partisipasi digital yang masih dipertanyakan (Ruvalcaba-Gomez et al., 2020). Di sisi lain, dalam konteks benua Afrika, pemerintah Nigeria dinilai tidak mampu menerbitkan pedoman kebijakan untuk data pemerintahan terbuka (*Open Government Data*) yang mengindikasikan kurangnya kemauan politik Nigeria untuk mengimplementasikan pemerintahan terbuka (Ezema, 2023). Berbeda dengan Nigeria, inisiasi pemerintahan terbuka di Afrika Selatan menunjukkan terdapatnya sedikit gagasan keterbukaan yang mengarah pada inklusivitas dimana masalah inklusivitas, terutama dalam hal ras, jenis kelamin, dan keuntungan ekonomi yang tidak merata merupakan masalah serius yang dihadapi Afrika Selatan (Plantinga & Adams, 2021).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah menunjukkan inisiasi pemerintahan terbuka dengan berpartisipasi aktif dalam *Open Government Partnership* sejak 2011 hingga saat ini. Selain itu, pada tahun 2012, Indonesia meluncurkan *National Action Plan* atau Rencana Aksi Nasional (RAN) pertama dari inisiasi pemerintahan terbuka yang merupakan hasil dari ko-kreasi pemerintah bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). RAN ini berisikan komitmen-komitmen melalui nilai *Open Government Indonesia* (OGI), yakni transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif, serta berfokus pada peningkatan lembaga pelayanan publik dan peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya publik (*Open Government Indonesia*, 2022).

Selanjutnya, inisiasi pemerintahan terbuka juga terus mengalami perkembangan yang salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi, seperti penerapan teknologi oleh pemerintah lokal Meksiko (Ruvalcaba-Gomez et al., 2020). Pemerintah dan aktivis semakin memusatkan perhatiannya pada bagaimana perkembangan pesat dari teknologi ini dapat membantu keterbukaan pemerintah kepada warganya melalui penggunaan media sosial untuk berkomunikasi secara lebih baik dan lebih langsung dengan masyarakat umum (Mergel, 2013). Fenomena adopsi dan penggunaan media sosial di sektor publik ini disebut dengan “Mediatisasi Sosial” (*Social Mediatization*) yang merupakan katalis transformasi digital bagi pemerintah dan organisasi layanan publik dalam inisiasi pemerintahan terbuka (Lim et al., 2022). Adopsi dan implementasi media sosial sebagai inisiasi pemerintahan terbuka telah dibahas dalam berbagai studi terdahulu, seperti penelitian Gunawong (2015) yang membahas penggunaan Facebook, LinkedIn, dan YouTube oleh Gubernur negara bagian di Amerika Serikat. Selain itu, Kota Hangzhou, Nanjing, dan Xi’an juga telah menggunakan media sosial untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Zhou & Wang, 2014). Pada konteks Asia Tenggara, pemerintahan Thailand telah menunjukkan penggunaan media sosial untuk mempertahankan hubungan masyarakat yang transparan (Gunawong & Jankananon, 2015).

Penggunaan media sosial dalam rangka mendukung pemerintahan terbuka yang lebih transparan dan partisipatif bergantung pada akses ke internet yang didapatkan oleh masyarakat. Tren global yang menuju peningkatan konektivitas juga dialami oleh Indonesia, dimana kaum muda di perkotaan dapat dengan cepat menangkap peluang yang diberikan oleh teknologi digital dan mengubah kebiasaan sosial mereka dengan secara aktif mengakses media sosial. Meskipun masih terdapat kesenjangan akses

teknologi pada segmen populasi tertentu, data yang diolah oleh We Are Social & Kepios pada Januari 2022 menunjukkan bahwa sekitar 205 juta Warga Negara Indonesia merupakan pengguna internet. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi di seluruh Indonesia dapat mengakses internet, ditambah dengan langkah pemerintah yang terus mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mentransformasi keterbukaan informasi (Utama et al., 2019). Dengan demikian, kelebihan yang ditawarkan oleh media sosial ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia guna mengimplementasikan pemerintahan terbuka.

Selain kehadiran akun media sosial resmi milik pemerintah, seperti Kementerian, Lembaga negara, dan lain-lain, pemerintah pusat juga telah membuka Saluran YouTube “Sekretariat Presiden” yang Dikelola oleh Biro Pers, Media dan Informasi. Saluran tersebut bergabung di YouTube pada 21 Januari 2019 dan memiliki jumlah pelanggan (*subscriber*) sekitar dua juta pengguna YouTube. Per Juni 2022, jumlah pelanggan saluran YouTube tersebut mengalami penambahan sejumlah 25% dan jumlah penampil video yang bertambah sekitar 48,9% (Social Blade, n.d.). Saluran YouTube yang pertama kali mengunggah video pada 12 Februari 2019 ini memberikan informasi terbaru terkait kegiatan Presiden Joko Widodo dan acara kepresidenan lainnya.

Studi sebelumnya telah membahas implementasi pemerintahan terbuka di Indonesia, baik dalam studi kasus pemanfaatan media sosial oleh Kementerian Luar negeri (Utama et al., 2019), adaptasi platform Website 2.0 oleh institusi pemerintah lokal Indonesia (Adnan et al., 2021), *Open Government Data* (OGD) di Indonesia (Gunawan & Amalia, 2017; Purwanto et al., 2020) dan pengembangan pemerintahan terbuka untuk mencapai terwujudnya *E-Government* di Indonesia (Sabani et al., 2019). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pengaplikasian saluran YouTube Sekretariat Presiden sebagai salah satu upaya implementasi pemerintahan terbuka Indonesia melalui media sosial.

Pemerintahan Terbuka dan Mediatisasi Sosial

Akselerasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan media sosial, dianggap memiliki keterkaitan dengan inisiasi pemerintahan terbuka. Sebagai konsep multidisiplin yang terus mengalami perkembangan, pemerintahan terbuka memiliki lima elemen utama, yakni ketersediaan informasi, transparansi, partisipasi, kolaborasi, dan teknologi (Gil-Garcia et al., 2020). Elemen pertama, yakni ketersediaan informasi, mengacu pada penyediaan informasi publik, seperti data yang disajikan oleh pemerintah melalui media social, situs web, dan mekanisme lainnya (Lim et al., 2022). Ketersediaan informasi ini akan membuka arus penyebaran informasi yang dapat bermanfaat bagi warga negara dan pemangku kepentingan lainnya (Dawes, 2010; Zuiderwijk et al., 2014). Meskipun berbagai tantangan terhadap akses informasi digital masih dialami beberapa segmen populasi warga negara, ketersediaan informasi tetap menjadi langkah dasar untuk mencapai kebijakan pemerintah yang transparan. Dalam konteks Indonesia, gerakan keterbukaan data telah dimulai dengan dukungan pemerintah untuk mempublikasikan data publik oleh institusi dalam bentuk *One Data Initiatives* (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), n.d.). Secara umum,

Indonesia masih melakukan langkah awal dengan inventarisasi data dan mulai mempublikasikan kunci rangkaian data untuk kepentingan publikasi (Gunawan & Amalia, 2017).

Elemen kedua, yakni transparansi sebagai langkah lanjutan setelah ketersediaan akses informasi. Meijer (2013) mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan informasi mengenai seorang aktor yang memungkinkan aktor lain untuk memantau cara kerja atau mengevaluasi kinerja aktor pertama. Informasi yang tersedia juga perlu memiliki karakteristik tertentu yang mewakili kualitas dan kesesuaian untuk dimanfaatkan serta memiliki mekanisme dan saluran yang tepat, sehingga warga negara dan pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakannya, baik secara individu maupun kolektif (Meijer, 2013). Beberapa penulis berpendapat bahwa transparansi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan menjadi alat untuk memaksimalkan utilitas informasi sebagai barang kolektif yang akan mendorong partisipasi (Fierro & Gil-Garcia, 2011; Lathrop & Ruma, 2010). Purwanto et al., (2020) telah meneliti signifikansi dari transparansi data pada studi kasus Pemilihan Umum di Indonesia dan menunjukkan bahwa terdapat enam faktor yang berkontribusi terhadap terwujudnya *Open government Data* (OGD), yaitu budaya demokrasi, ketersediaan pengaturan kelembagaan yang mendukung keterbukaan, faktor teknis dalam penyediaan OGD, ketersediaan sumber daya masyarakat, pengaruh hubungan sosial, dan kualitas data yang dirasakan warga.

Elemen ketiga, yakni partisipasi, terjadi ketika publik yang menjadi bagian dari pengumpulan massa maupun tidak, terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan di sektor publik melalui diskusi dan konsultasi, seperti berkomunikasi dengan pejabat publik (*non-crowdsourcing*) atau berbagi cerita di media sosial (*crowdsourcing*) (Harrison et al., 2012; Lim et al., 2022). Publik berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui beberapa cara yang bervariasi, mulai dari kesempatan untuk terlibat dalam proses demokrasi hingga penggunaan alat komunikasi untuk mengajukan klaim atau mendapatkan akses ke pejabat publik (Medaglia, 2012; Vicente & Novo, 2014). Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat umum dengan mengakses data pemerintah dapat meningkatkan kemungkinan partisipasi. Kemudian, partisipasi ini diciptakan untuk memberi peluang terjadinya kolaborasi sebagai elemen keempat dari pemerintahan terbuka. Kolaborasi terjadi ketika publik, terutama mereka yang kreatif, inovatif, berpengetahuan, dan terampil, bersama-sama menciptakan produk atau solusi tertentu dengan pemerintah dan organisasi layanan publik (Lim et al., 2022). Dengan terbukanya peluang untuk berpartisipasi, maka masyarakat juga memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan pemerintah untuk bekerja sama menciptakan solusi dan inovasi dalam mengatasi berbagai permasalahan nasional dan isu sosial.

Elemen kelima dari pemerintahan terbuka yang diidentifikasi dalam literatur terbaru adalah teknologi informasi (TI), yang mengacu pada penggunaan situs web, aplikasi seluler, dan teknologi lainnya untuk menyediakan akses ke informasi serta menjadi platform untuk terciptanya partisipasi dan kolaborasi (Lim et al., 2022). Pemerintah dapat memanfaatkan perangkat digital untuk membuka peluang interaksi dan kolaborasi yang lebih luas, baik antar lembaga pemerintah maupun antara

pemerintah dan aktor sosial lainnya (Ganapati & Reddick, 2014). Oleh sebab itu, teknologi informasi merupakan alat yang kuat dan dapat memberikan akses bagi individu terhadap informasi yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara lebih efektif dengan pihak berwenang, membuat keputusan yang lebih baik dalam kegiatan sehari-hari mereka, dan berpotensi untuk membuka peluang inovasi (Chun & Luna Reyes, 2012; Fierro & Gil-Garcia, 2012).

Potensi pemerintahan terbuka dengan mengadopsi aplikasi media sosial secara teoritis berasal dari dimensi logika mediatisasi sosial dengan konsep programabilitas, konektivitas, dan popularitas yang digagaskan oleh van Dijck & Poell (2013) dan dipopulerkan dalam studi yang dilakukan oleh Olsson & Eriksson (2016). Pertama, programabilitas merujuk pada kemampuan platform media sosial untuk memicu dan mengarahkan kontribusi kreatif atau komunikatif dari penggunanya yang kemudian interaksi dalam lingkungan daring ini dapat mempengaruhi aliran komunikasi dan informasi pada platform tersebut (van Dijck & Poell, 2013). Contoh programabilitas adalah aktivitas khas Facebook seperti “suka”, “bagikan”, dan “berteman” yang mempengaruhi hubungan dan interaksi pengguna (Olsson & Eriksson, 2016). Pemerintah dan organisasi layanan publik semakin menggunakan media sosial secara proaktif dengan mengumpulkan massa dalam rangka menciptakan ide kebijakan publik dan implementasi bersama, dibanding secara pasif dengan hanya membagikan informasi tanpa memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik dari publik (Alon-Barkat, 2020; Khurshid et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi menjadi platform yang hanya dimanfaatkan pemerintah untuk menciptakan kesadaran publik dan wadah sosialisasi semata (Lee & Kwak, 2012), tetapi juga untuk menggalang partisipasi dan kolaborasi dengan publik (Hidayat et al., 2019).

Kedua, gagasan konektivitas mengimplikasikan media sosial sebagai platform yang menghubungkan pengguna dengan orang-orang yang berpikiran sama dan mendapatkan konten pilihan yang sama, sehingga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan berkomentar, menyukai dan berbagi konten tersebut satu sama lain (Lim et al., 2022). Konektivitas juga dapat berfungsi untuk mengaburkan isu-isu yang berkaitan dengan kontrol dan kekuasaan serta berpotensi membentuk kembali hierarki yang ada antara kepentingan publik, swasta, dan perusahaan (Olsson & Eriksson, 2016; van Dijck & Poell, 2013). Media sosial membuka peluang dan memfasilitasi dialog partisipatif antara pemerintah, organisasi layanan publik, dan masyarakat guna memberikan suara kolektif dan inklusif bagi inisiasi kebijakan publik dan pelaksanaannya (Lovari & Valentini, 2020). Oleh sebab itu, berbeda dengan media tradisional, publik menjadi memiliki peluang untuk terlibat dan berinteraksi dengan konten yang dibagikan di media sosial secara langsung.

Ketiga, gagasan popularitas menunjukkan bahwa media sosial adalah wadah yang mengangkat populasi dan konten dengan cara yang egaliter dimana semua penggunanya memiliki hak dan peluang yang sama untuk menjadi populer dan menuai manfaat dari media tersebut, seperti menarik ‘followers’ dan ‘likes’ (Lim et al., 2022). Meskipun media sosial menjanjikan kesetaraan, teknik dan praktik yang serupa dengan media konvensional

untuk mengangkat konten-konten dan orang-orang populer masih dapat terlihat mendominasi, seperti pada Twitter dan Facebook (van Dijck & Poell, 2013). Literatur menunjukkan bahwa pemerintah dan organisasi layanan publik telah memetik manfaat dari viralitas konten populer yang diunggah di media sosial, termasuk penyebaran konten selama pandemi COVID-19 (Chen et al., 2020; Rao et al., 2020).

Selanjutnya, signifikansi media sosial dalam implementasi pemerintahan terbuka telah menginspirasi Lim et al., (2022) untuk menggagaskan sebuah teori terpadu yang menyatukan dimensi pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial guna mengeksplorasi perkembangan implementasi pemerintahan terbuka yang beriringan dengan perkembangan teknologi. Keterkaitan yang diusulkan antara kedua konsep tersebut menghasilkan tiga proposisi yang ditawarkan Lim et al., (2022) sebagai sebuah lensa teoritis berikut.

P1. Teknologi adalah katalisator yang mendorong ketersediaan informasi, partisipasi, dan kolaborasi dalam pemerintahan terbuka.

P2. Transparansi dalam pemerintahan terbuka dibentuk oleh ketersediaan informasi, partisipasi, dan kolaborasi.

P3. Media sosial adalah teknologi yang memberdayakan pemerintahan terbuka, dan konektivitas, programabilitas, serta popularitas media sosial memungkinkan ketersediaan informasi, partisipasi, dan kolaborasi dalam pemerintahan terbuka.

Proposisi pertama (P1) menyatakan bahwa teknologi akan memperkuat upaya inisiasi pemerintahan terbuka dengan memungkinkan pemerintah dan organisasi layanan publik dalam menyebarkan informasi sekaligus mempromosikan partisipasi serta kerjasama dengan masyarakat umum. Proposisi kedua (P2) didasarkan pada Proposisi pertama (P1) dan menjelaskan dampak dari persebaran informasi, promosi partisipasi masyarakat, dan kerjasama dengan masyarakat umum, yaitu transparansi. Kemudian, Proposisi ketiga (P3) memperkenalkan media sosial sebagai teknologi yang mengakselerasi implementasi pemerintahan terbuka serta alasan kesesuaiannya dalam mempromosikan transparansi melalui prinsip konektivitas, programabilitas, dan popularitas.

Penggunaan media sosial dalam implementasi pemerintahan terbuka di Indonesia telah diaplikasikan oleh Kementerian Luar Negeri melalui Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Penggunaan media sosial oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia merupakan tujuan strategis dalam mewujudkan pemerintahan terbuka dengan memanfaatkan diplomasi digital, meskipun dinilai masih berada dalam tahap inisiasi (Utama et al., 2019). Kemudian, pemerintah lokal di Indonesia, seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Situbondo, dan jember juga telah mengadopsi Web 2.0 yang dipengaruhi oleh teknologi, organisasi, manajerial, dan faktor lingkungan (Adnan et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memberikan penjelasan mengenai pengadopsian media sosial YouTube dalam implementasi pemerintahan terbuka di Indonesia melalui saluran Sekretariat Presiden.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data dan perumusan asumsinya. Penelitian kualitatif menekankan pada pemikiran induktif dengan mengamati, menafsirkan, dan merefleksikan data penelitian (Neuman, 2014, Hal. 95). Guna mendapatkan penjelasan mengenai implementasi pemerintahan terbuka Indonesia melalui media sosial YouTube, maka penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yang berusaha untuk memahami konteks tertentu dan meyakini bahwa realitas dikonstruksi secara sosial (Willis, 2007, Hal. 54). Kemudian, untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai realitas penerapan pemerintahan terbuka dalam konteks YouTube Sekretariat Presiden, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Bogdan & Biklen (2003, Hal. 54) mendefinisikan studi kasus sebagai pemeriksaan rinci dari satu keadaan, subjek tunggal, penyimpanan dokumen tunggal, atau satu peristiwa tertentu. Dalam rangka mengeksplorasi studi kasus ini, peneliti menyajikan sebuah teori deskriptif yang menetapkan kerangka keseluruhan bagi peneliti untuk diikuti selama penelitian (Lune & Berg, 2017, Hal. 176). Lantas, peneliti menetapkan teori terpadu pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial yang digagaskan oleh Lim et al., (2022) sebagai kerangka penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara dimana peneliti memiliki daftar pertanyaan atau topik yang cukup spesifik untuk dibahas, sering disebut sebagai panduan wawancara, tetapi orang yang diwawancarai memiliki banyak waktu untuk menjawab (Bryman, 2012). Dikarenakan *purposive sampling* identik dengan penelitian kualitatif (Palys, 2008, hal. 697), maka dari itu peneliti memilih partisipan di lingkungan mahasiswa pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang kehumasan untuk dilibatkan ke dalam kegiatan wawancara. Hal ini dilatarbelakangi pada dibutuhkannya kemampuan partisipan untuk dapat memahami terlebih dahulu konsep kehumasan serta teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dimiliki oleh para mahasiswa pascasarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia pada kegiatan perkuliahan sebelumnya. Partisipan sebagai informan dalam penelitian ini adalah Informan 1 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Informan 2 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan Informan 3 (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Wawancara dilakukan pada 6 Juni 2022 secara satu persatu melalui ruangan daring Zoom dan GoogleMeet. Panduan wawancara ditetapkan dengan mengikuti proposisi dari kerangka teori terpadu pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial, namun tetap memberikan kesempatan bagi para informan untuk menjawab pertanyaan secara lebih terbuka guna mendapatkan pengalaman dari para informan. Selain data primer, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan situs pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai tambahan, peneliti juga mengobservasi saluran YouTube Sekretariat Presiden untuk menyelidiki konten-konten serta aktivitas pada saluran tersebut pada periode 30 Mei 2022 sampai 5 Juni 2022.

Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan teknik analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman, (1994, Hal. 10) dimana analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik konfirmasi data yang dilakukan adalah melakukan triangulasi dari berbagai data yang didapatkan, yakni hasil wawancara, observasi pada akun YouTube Sekretariat Presiden, serta berbagai studi literatur.

TEMUAN HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Pada periode 2020-2022, Indonesia telah merumuskan Rencana Aksi Nasional *Open Government Indonesia* (OGI) yang mendukung misi Presiden ke-8, yakni “Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” sebagai bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 untuk memperkuat stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, dan keamanan) serta transformasi pelayanan publik (*Open Government Indonesia*, 2022). Selain itu, implementasi RAN OGI keenam merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pencapaian agenda global, yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam rangka mencapai berbagai tujuan dari RAN yang terus diperbarui secara berkala, pemerintah Indonesia memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator dari implementasi pemerintah terbuka, salah satunya dengan media sosial YouTube.

Hasil wawancara semi-terstruktur dengan mengikuti kerangka teori terpadu pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial menunjukkan terdapatnya beberapa aspek yang ditemukan dalam implementasi pemerintahan terbuka Indonesia melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden. Secara umum, inisiatif pemerintah dengan membuat saluran YouTube Sekretariat Presiden merupakan hal yang baik bagi perkembangan keterbukaan pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh informan sebagai berikut.

“YouTube menjadi wadah yang tepat untuk menunjukkan kinerja pemerintah dan menyediakan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai topik-topik tertentu” – Informan 2

“YouTube menjadi rujukan informasi di instansi, sebagai informasi A1. Tempat info yang valid karena langsung dari presiden, seperti breaking news tentang mudik, pelonggaran masker” – Informan 1

Dengan berbagai konten yang diunggah, seperti pernyataan presiden, menteri, dan instansi yang berkaitan dengan isu-isu seperti kelangkaan minyak goreng, mudik lebaran 2022, dan kebijakan kelonggaran penggunaan masker memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan dapat menjadi rujukan informasi yang valid serta kredibel. Mengingat YouTube merupakan situs web yang paling sering dikunjungi ke-dua setelah google.com (We Are Social & Kepios, 2022), maka pemerintah memanfaatkan kesempatan ini sebagai wadah informatif. Dengan pembicara yang merupakan pemangku kepentingan, seperti Presiden, Menteri, dan Juru Bicara Satgas COVID-19, konten pada saluran ini berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Kredibilitas saluran YouTube Sekretariat Presiden ini juga

menjadi rujukan bagi instansi-instansi pemerintahan lainnya, seperti di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, informan juga menyatakan bahwa mekanisme unggahan video, terutama fitur deskripsi video pada YouTube Sekretariat Presiden meningkatkan kredibilitas akun tersebut.

“Namun menarik untuk melihat deskripsi dari tiap konten yang mampu merangkum poin-poin penting dalam unggahan. Hal ini penting untuk mencegah adanya kesalahan persebaran informasi, kemunculan informasi hoax atau salah tafsir oleh penontonnya” – Informan 2

Sejalan dengan pernyataan informan, hasil observasi pada akun YouTube Sekretariat Presiden menunjukkan terdapatnya penjelasan mengenai konten video pada kolom deskripsi dengan memberikan rangkuman mengenai hal-hal penting yang dibahas dalam unggahan guna meminimalisir penyebaran misinformasi dan disinformasi oleh publik maupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, aspek audio visual yang disediakan oleh YouTube juga menambah nilai kredibilitas informasi dari akun Sekretariat Presiden karena dapat memperlihatkan pembicara.

“YouTube terasa lebih kredibel dibanding sosmed lain karena terlihat mimik wajah presiden yang menyampaikan info dengan formal, sehingga jika dishare ulang lebih kredibel” – Informan 1

Berkaitan dengan transparansi, ketiga informan menyampaikan bahwa berbagai konten yang diunggah ke akun YouTube Sekretariat Presiden telah disesuaikan dengan sifat kanal YouTube yang mengedepankan aspek audio-visual dan menerapkan filtrasi dalam penyampaian berbagai informasi negara. Mengingat saluran ini merupakan saluran resmi yang dikelola oleh pemerintah, maka konten yang disajikan juga cenderung bersifat formal.

“Info negara tidak bisa serta merta disampaikan sehingga pasti ada filternya. Jadi, untuk konsumsi publik sudah memenuhi transparansi” – Informan 1

“Tentu masih sangat wajar jika ada penyesuaian sejumlah tampilan konten agar lebih menarik saat disajikan” – Informan 3

“Konten-konten yang disajikan pada kanal ini sepertinya... terlalu bersifat seremonial atau agak dibuat-buat” – Informan 2

Kemudian, masyarakat Indonesia terkenal dengan interaktivitasnya yang tinggi dalam bermedia sosial. Dengan pengguna media sosial sejumlah 191,4 juta pengguna dan waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna dalam menggunakan YouTube yang mencapai 26,4 jam per bulan (We Are Social & Kepios, 2022) maka dapat terlihat interaktivitas masyarakat Indonesia dalam mengakses YouTube yang cukup tinggi. *Engagement* publik dengan saluran YouTube Sekretariat Presiden salah satunya dapat terlihat dari kolom komentar dan *likes*. Dengan fitur yang disediakan oleh YouTube, publik dapat membagikan pemikiran dan pendapat mereka secara mudah.

“Apabila kita melihat kolom chat real time (live comment), maka terlihat ada beragam pendapat atau pergerakan opini masyarakat secara cepat, langsung pada saat itu juga. Kemudian, pada kolom komentar di bawah lebih terlihat pemikiran atau pendapat masyarakat yang lebih mendalam. Namun, jika diamati lebih

lanjut, kolom komentar yang ada di bawah umumnya berisi kata-kata positif, sangat sedikit adanya kritik yang membangun dari masyarakat. Padahal melalui kritik yang baik dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya” – Informan 2

“Engagement di akun YouTube Setpres sudah baik, ditandai dengan telah dicapainya jutaan subscribers dan viewer yang nyaris selalu mencapai ratusan ribu di tiap konten, jumlah dislikes yang nyaris tidak ada di tiap konten. Memang tidak diketahui secara pasti apakah kesemuanya itu organik atau berbayar” – Informan 3

Selain kolom komentar yang sebagian besar berisi pujian dan dukungan, kehadiran saluran YouTube Sekretariat Presiden masih terkesan menggunakan komunikasi satu arah dikarenakan tidak terdapatnya umpan balik yang diberikan pengelola saluran tersebut. Saluran YouTube ini juga masih tersegmentasi dikarenakan pelanggan saluran yang belum mencapai setengah dari jumlah keseluruhan masyarakat Indonesia, sehingga hasil wawancara menyatakan masih rendahnya manajemen terhadap saluran Sekretariat Presiden yang belum menampilkan performa sebagaimana diharapkan.

“Jika dibandingkan dengan seluruh WNI, maka manajemen masih rendah karena yang menonton masih tidak sampai 50% dari masyarakat Indonesia... komentar pada unggahan YouTube atau live juga tidak ada feedback, semestinya admin berperan. Jadi, YouTube masih satu arah dan dipakai untuk saluran informasi satu arah.” – Informan 1

Selanjutnya, hasil wawancara menemukan bahwa peluang kolaborasi pembuatan konten pada saluran Sekretariat Presiden dengan publik sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh konteks saluran YouTube Sekretariat Presiden yang resmi. Selain itu, berkolaborasi dengan individu atau kelompok tertentu memiliki resiko terhadap citra netralitas dari saluran pemerintahan yang dikhawatirkan hanya akan berpihak pada individu, kelompok, maupun isu tertentu.

“Kemungkinan kolaborasi konten dengan publik kecil, karena konteks saluran yang resmi, sehingga agak riskan jika berkolaborasi dengan individu atau kelompok tertentu yang dapat pengaruhi citra. Untuk wadah aspirasi, sosmed sebenarnya hanya sebagai saluran informasi, bukan aduan. Namun, masyarakat mungkin belum mengetahui adanya platform seperti “Lapor”” – Informan 1

“Ada potensi kolaborasi cuma ya kayaknya ga semua masyarakat punya akses ke kanal YouTube ini, jadi hanya menjangkau masyarakat tertentu. Sepertinya kalau dilihat sejauh ini partisipasi yang “boleh” dilakukan oleh masyarakat hanya memberikan likes, comment, dan subscribe” – Informan 2

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengaitkan kehadiran saluran YouTube ini dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang kemungkinan besar belum benar-benar memahami kanal-kanal yang berfungsi sebagai pusat aduan masyarakat, seperti aplikasi berbasis media sosial LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Aplikasi ini

merupakan produk teknologi terbaru yang diinisiasi oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dan disediakan untuk warga Indonesia melaporkan kesalahan dalam pelayanan publik, termasuk pemungutan “biaya” administrasi yang kerap kali terjadi dalam proses pelayanan publik. Oleh karena itu, informan menyatakan bahwa partisipasi yang sejauh ini dapat dilakukan di saluran YouTube Sekretariat Presiden adalah hanya dengan memberikan *likes*, *comment*, dan *subscribe*.

Ketiga informan juga menyatakan popularitas akun YouTube Sekretariat Presiden masih perlu ditingkatkan mengingat kanal ini memberikan peluang bagi pemerintah dalam upaya implementasi pemerintahan terbuka.

“Dari sisi internal pemerintahan memang sudah populer karena dijadikan rujukan utama setiap ada isu penting. Jadi, memang popularitas konten ini yang kemudian di alihmediakan ke kanal lain sudah tepat, karena memang fungsinya untuk menjadi rujukan informasi” – Informan 1

“Jumlah penontonnya fluktuatif dan tidak jarang kurang dari 10 ribu pengguna. Padahal terdapat lebih dari 200 juta masyarakat di Indonesia. Sehingga dapat diartikan belum banyak masyarakat yang mengetahui dan menonton channel YouTube terkait. Pemerintah perlu lebih gencar mempromosikan kanal ini agar diketahui khalayak banyak” – Informan 2

“Popularitas akun YouTube Setpres tidak perlu diragukan lagi, walaupun tentu masih sangat mungkin untuk terus ditingkatkan” – Informan 3

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan tersebut, akun YouTube Sekretariat Presiden menjadi salah satu sumber informasi yang populer di kalangan ASN. Namun, jumlah penontonnya yang sangat berbanding jauh dengan jumlah seluruh masyarakat Indonesia, maka kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan menonton saluran YouTube tersebut. Dengan jumlah pelanggan sekitar 2 juta pengguna YouTube beserta konten-kontennya yang resmi dikelola oleh pemerintah, popularitas saluran ini kemudian juga digunakan sebagai rujukan atau berita yang valid oleh media massa lainnya.

Diskusi Teoretik

Berdasarkan pada pengkategorian media sosial yang digagaskan oleh Kotler et al., (2019), maka YouTube merupakan media sosial yang digunakan dengan tujuan ekspresif. Saluran YouTube Sekretariat Presiden menjadi sarana penyampaian pesan yang berkaitan dengan berbagai kinerja pemerintah kepada publik. Melalui kontennya yang menyajikan aspek audio visual dan berbagai fitur yang tersedia pada kanal, kredibilitas informasi yang disebarkan menjadi lebih terakselerasi. Sebagaimana dengan pernyataan Meijer (2013) bahwa transparansi memungkinkan publik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, maka saluran YouTube Sekretariat Presiden menjadi salah satu kanal yang dapat menyediakan informasi terkait kinerja pemerintah dan publik dapat memanfaatkan informasi terkait isu-isu terkini dari saluran tersebut.

Dengan merujuk pada proposisi 1 (P1) dari teori terpadu pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial, maka penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi telah mengakselerasi upaya inisiasi pemerintahan terbuka dengan memungkinkan pemerintah dan organisasi layanan publik dalam menyebarkan informasi. Namun, promosi partisipasi serta kerjasama dengan masyarakat umum belum tercapai sebab partisipasi publik melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden masih terbatas dengan memberikan *view*, *likes*, *comment*, *subscribe*, dan *share*. Hal ini dikarenakan programabilitas media sosial yang dimanfaatkan pemerintah hanya untuk berbagi informasi tanpa niat dan kesempatan untuk mengumpulkan umpan balik publik, yaitu secara pasif (Khurshid et al., 2020). Konten-konten yang formal dan sangat seremonial pada saluran YouTube ini juga membatasi partisipasi publik karena pada dasarnya publik cenderung memilih cara yang lebih santai dan alami untuk terlibat dengan pemerintah (Mergel, 2013).

Selanjutnya, tekanan eksternal, pembungkaman ulang, dan perubahan kelembagaan dapat memengaruhi cara organisasi pemerintah menyediakan informasi bagi warga negara (Meijer, 2013). Berdasarkan hasil penelitian, saluran YouTube Sekretariat Presiden juga melakukan filtrasi guna memilih informasi yang dianggap layak disebarluaskan ke publik sekaligus menyesuaikan dengan sifat ekspresif dari media sosial YouTube. Pada dasarnya, transparansi pemerintah merupakan hal yang dilematis dikarenakan seperti produk teknologi informasi lainnya, masalah keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama dari adopsi Web 2.0 di Indonesia (Adnan et al., 2021). Dengan demikian, melalui proposisi 2 (P2) maka dapat dijelaskan bahwa transparansi dalam implementasi pemerintahan terbuka di Indonesia melalui YouTube Sekretariat Presiden masih terbatas pada ketersediaan informasi dalam konten-konten yang telah diunggah.

Kemudian, akses masyarakat Indonesia terhadap YouTube masih tersegmentasi dan juga berkaitan dengan masih terdapatnya kesenjangan digital (*digital divide*) di Indonesia. Kondisi ini telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Ariansyah et al., (2019) bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar setengah dari 34 Provinsi di Indonesia, terutama di Indonesia bagian timur, memiliki peluang yang lebih rendah untuk memiliki lebih banyak keterampilan TIK dibandingkan dengan mereka yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, interaksi pada saluran YouTube Sekretariat Presiden yang masih satu arah juga mempersempit peluang kolaborasi dengan publik. OECD telah memperhatikan bahwa meskipun pemerintah semakin aktif menggunakan media sosial, namun saluran ini masih digunakan sebagai alat komunikasi tradisional, daripada untuk membuka proses kebijakan atau untuk cara-cara inovatif dalam memberikan layanan publik (OECD, 2016a). Penelitian ini mendapatkan hasil yang serupa dengan studi yang dilakukan Pirannejads & Ingrams (2022) bahwa dalam studi kasus YouTube, keterlibatan publik hanya sebatas memberikan *likes*, *comment*, dan *subscribe* yang merupakan aspek konektivitas dari media sosial, sehingga aspek pemerintahan terbuka, seperti transparansi data, sangat lebih mudah diterapkan oleh pemerintah meskipun dalam waktu yang bersamaan pemerintah tidak mewujudkan area keterbukaan lainnya, seperti partisipasi dan kolaborasi publik.

Fenomena tersebut dijelaskan oleh proposisi 3 (P3) dari teori terpadu pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial dimana berdasarkan hasil penelitian ini, maka saluran YouTube Sekretariat Presiden merupakan salah satu teknologi yang digunakan pemerintah Indonesia untuk memberdayakan pemerintahan terbuka. Namun, konektivitas, programabilitas, dan popularitas dari saluran tersebut masih terfokus pada penyediaan informasi dan partisipasi yang terbatas melalui fitur-fitur yang disediakan kanal YouTube. Hal ini dikarenakan fitur komentar dan peluang kolaborasi belum diberdayakan oleh pengelola saluran YouTube Sekretariat Presiden.

Jika dilihat melalui logika mediatisasi sosial, konektivitas dan programabilitas yang ditawarkan YouTube dapat mendorong popularitas konten. Meskipun jumlah penonton dan pelanggan saluran YouTube Sekretariat Presiden masih jauh dari yang diharapkan untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, namun diseminasi informasi terkait kinerja pemerintah dan isu-isu terkini yang dikelola secara resmi menjadi rujukan bagi diseminasi informasi masyarakat yang lebih luas, seperti menjadi rujukan bagi kantor berita nasional maupun lokal dan rujukan informasi bagi instansi pemerintahan lainnya. Peran saluran YouTube Sekretariat Presiden sebagai rujukan informasi ini sudah sesuai dengan tujuan awal penggunaan media sosial oleh pemerintah. Serupa dengan penelitian Utama et al., (2019) yang membahas tingkat kematangan adopsi media sosial oleh Kementerian Luar Negeri, adopsi YouTube Sekretariat Presiden sebagai implementasi pemerintahan terbuka berada pada tahap awal, yakni sebagai sarana ketersediaan informasi dan transparansi. Ketersediaan informasi dan transparansi ini merupakan langkah dasar yang penting dalam mengembang keterbukaan pemerintah Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih gencar mempromosikan kanal ini sehingga dapat diketahui khalayak banyak dan dapat meningkatkan konektivitas, programabilitas, serta popularitas saluran Sekretariat Presiden.

KESIMPULAN

Saluran YouTube Sekretariat Presiden menjadi salah satu sarana yang memberdayakan pemerintahan terbuka, meskipun partisipasi publik masih terbatas dan kolaborasi antara pemerintah dan publik masih memerlukan manajemen media sosial yang lebih lanjut. Dengan menggunakan teori terpadu pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial, penelitian ini dapat menjelaskan peran YouTube Sekretariat Presiden yang memungkinkan pemerintah untuk terlibat langsung dengan publik melalui cara yang menyesuaikan perkembangan tren dan memberikan kemudahan akses terhadap informasi. Teori ini juga menyiratkan bahwa pemerintah perlu memahami cara kerja media sosial untuk dapat mengatasi tantangan atas implementasi pemerintahan terbuka. Selain diperlukannya pembenahan jangkauan literasi digital kepada masyarakat secara umum, pemberian umpan balik terhadap publik juga perlu ditingkatkan agar interaktivitas pemerintah dan publik melalui YouTube dapat lebih terbangun dan peluang keterbukaan akan semakin meluas.

Temuan penelitian ini diturunkan menggunakan pendekatan studi kasus tunggal. Penelitian di masa depan dapat menyelidiki banyak kasus dan membandingkan kondisi serta faktor keterlibatan dari sudut pandang publik

dengan inisiasi pemerintahan terbuka Indonesia dalam konteks yang berbeda. Sebagaimana pernyataan Lim, et. al., (2022), teori terpadu pemerintahan terbuka dan mediatisasi sosial yang diusulkan di sini adalah konseptual dan dengan demikian perlu divalidasi secara empiris dengan metode kuantitatif melalui pengembangan skala pengukuran untuk setiap konstruk dalam teori terpadu, yang dapat diadopsi, diadaptasi, atau dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annan, H. R., Hidayanto, A. N., & Kurnia, S. (2021). Citizens' or Government's Will? Exploration of Why Indonesia's Local Governments Adopt Technologies for Open Government. *Sustainability*, 13(20), 11197. <https://doi.org/10.3390/su132011197>
- Alcaide Muñoz, C., Alcaide Muñoz, L., & Rodríguez Bolívar, M. P. (2022). Strategic Alignment of Open Government Initiatives in Andalusia. *International Review of Administrative Sciences*, 0(0), 002085232210861. <https://doi.org/10.1177/00208523221086125>
- Alon-Barkat, S. (2020). Can Government Public Communications Elicit Undue Trust? Exploring the Interaction between Symbols and Substantive Information in Communications. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(1), 77–95. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz013>
- Ariansyah, K., Anandhita, V. H., & Sari, D. (2019). Investigating the Next Level Digital Divide in Indonesia. *2019 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/TIMES-iCON47539.2019.9024668>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to Create A Culture of Transparency: E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2003). *Qualitative Research of Education: An Introductory to Theories and Methods* (4th ed.). Pearson Education Group, Inc.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (Fourth). Oxford University Press.
- Chen, Q., Min, C., Zhang, W., Wang, G., Ma, X., & Evans, R. (2020). Unpacking The Black Box: How to Promote Citizen Engagement through Government Social Media during The COVID-19 Crisis. *Computers in Human Behavior*, 110, 106380. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106380>
- Chun, S. A., & Luna Reyes, L. F. (2012). Social Media in Government. *Government Information Quarterly*, 29(4), 441–445. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.07.003>
- Dawes, S. S. (2010). Stewardship and Usefulness: Policy Principles for Information-based Transparency. *Government Information Quarterly*, 27(4), 377–383. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.001>
- Ezema, I. J. (2023). Availability and Access to Open Government Data in Nigeria: A Content Analysis of Government Websites and Nigerian Data Portal. *International Information & Library Review*, 55(1), 15–28. <https://doi.org/10.1080/10572317.2022.2061813>
- Fierro, A. E., & Gil-Garcia, J. R. (2012). Transparency Websites as Tools for Decision Making in A Democratic Government. *Transatlantic Conference on Transparency Research*.
- Ganapati, S., & Reddick, C. G. (2014). The Use of ICT for Open Government in U. S. Municipalities. *Public Performance & Management Review*, 37(3), 365–387. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576370302>
- Gil-Garcia, J. R., Gasco-Hernandez, M., & Pardo, T. A. (2020). Beyond Transparency, Participation, and Collaboration? A Reflection on the Dimensions of Open Government. *Public Performance & Management Review*, 43(3), 483–502. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1734726>
- Graham, M. W. (2014). Government Communication in The Digital Age: Social Media's Effect on Local Government Public Relations. *Public Relations Inquiry*, 3(3), 361–376. <https://doi.org/10.1177/2046147X14545371>
- Gunawan, D., & Amalia, A. (2017). The Implementation of open data in Indonesia. *Proceedings of 2016 International Conference on Data and Software Engineering, ICoDSE*

2016. <https://doi.org/10.1109/ICODSE.2016.7936164>
- Gunawong, P. (2015). Open Government and Social Media. *Social Science Computer Review*, 33(5), 587–598. <https://doi.org/10.1177/0894439314560685>
- Gunawong, P., & Jankananon, P. (2015). Flood 2.0: Facebook Use and Reactions during The 2011/2012 Flood in Thailand. *International Journal of Innovation and Learning*, 17(2), 162. <https://doi.org/10.1504/IJIL.2015.067405>
- Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N., Hrdinova, J., & Pardo, T. (2012). Open Government and E-government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective. *Information Polity*, 17(2), 83–97. <https://doi.org/10.3233/IP-2012-0269>
- Hidayat, S. E., Rafiki, A., & Al Khalifa, M. H. (2019). The Social Media Adoption of Public Sector in The Kingdom of Bahrain. *Journal of Advances in Management Research*, 16(1), 23–37. <https://doi.org/10.1108/JAMR-11-2017-0105>
- Khurshid, M. M., Zakaria, N. H., Rashid, A., Ahmad, M. N., Arfeen, M. I., & Faisal Shehzad, H. M. (2020). Modeling of Open Government Data for Public Sector Organizations Using the Potential Theories and Determinants—A Systematic Review. *Informatics*, 7(3), 24. <https://doi.org/10.3390/informatics7030024>
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2019). Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. In K. Kompella (Ed.), *Marketing Wisdom: Management for Professionals* (hal. 139–156). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7724-1_10
- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). *Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice*. O'Reilly Media, Inc.
- Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An Open Government Maturity Model for Social Media-based Public Engagement. *Government Information Quarterly*, 29(4), 492–503. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001>
- Lim, W. M., Rasul, T., & Ahmad, A. (2022). A Unified Theory of Open Government and Social Mediatization. *Business Information Review*, 39(3), 98–106. <https://doi.org/10.1177/02663821221104393>
- Lovari, A., & Valentini, C. (2020). Public Sector Communication and Social Media. In V. Louma-aho & M.-J. Canel (Ed.), *The Handbook of Public Sector Communication* (hal. 315–328). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119263203.ch21>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for Social Science* (Ninth). Pearson.
- Medaglia, R. (2012). eParticipation Research: Moving Characterization Forward (2006–2011). *Government Information Quarterly*, 29(3), 346–360. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.02.010>
- Meijer, A. (2013). Understanding the Complex Dynamics of Transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439. <https://doi.org/10.1111/puar.12032>
- Mergel, I. (2013). A Framework for Interpreting Social Media Interactions in The Public Sector. *Government Information Quarterly*, 30(4), 327–334. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.015>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed). Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Seventh Ed). Pearson Education Limited.
- OECD. (2016a). *Open Government in Indonesia*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264265905-en>
- OECD. (2016b). *Open Government: The Global Context and the Way Forward*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264268104-en>
- Olsson, E.-K., & Eriksson, M. (2016). The Logic of Public Organizations' Social Media Use: Toward A Theory of 'Social Mediatization.' *Public Relations Inquiry*, 5(2), 187–204. <https://doi.org/10.1177/2046147X16654454>
- Open Government Indonesia. (2022). *Open Government Indonesia*. <https://ogi.bappenas.go.id/>
- Plantinga, P., & Adams, R. (2021). Rethinking Open Government as Innovation for Inclusive Development: Open Access, Data and ICT in South Africa. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 13(3), 315–323. <https://doi.org/10.1080/20421338.2020.1746046>

- Purwanto, A., Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2020). Citizen Engagement with Open Government Data. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(1), 1–30. <https://doi.org/10.1108/TG-06-2019-0051>
- Rao, H. R., Vemprala, N., Akello, P., & Valecha, R. (2020). Retweets of Officials' Alarming vs Reassuring Messages during The COVID-19 Pandemic: Implications for Crisis Management. *International Journal of Information Management*, 55, 102187. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102187>
- Ruvalcaba-Gomez, E. A., Criado, J. I., & Gil-Garcia, J. R. (2020). Analyzing Open Government Policy Adoption through The Multiple Streams Framework: The Roles of Policy Entrepreneurs in The Case of Madrid. *Public Policy and Administration*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/0952076720936349>
- Ruvalcaba-Gomez, E. A., Criado, J. I., & Sandoval-Almazan, R. (2022). Contrasting the Perception of Open Government among Public Officials: A Factor Analysis of Mexico and Spain. *International Journal of Public Administration*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2075383>
- Sabani, A., Deng, H., & Thai, V. (2019). Evaluating the Development of E-Government in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Software Engineering and Information Management*, 254–258. <https://doi.org/10.1145/3305160.3305191>
- Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2012). Are Government Internet Portals Evolving towards More Interaction, Participation, and Collaboration? Revisiting The Rhetoric of E-government among Municipalities. *Government Information Quarterly*, 29, S72–S81. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.09.004>
- Schnell, S. (2020). Vision, Voice, and Technology: Is There a Global “Open Government” Trend? *Administration & Society*, 52(10), 1593–1620. <https://doi.org/10.1177/0095399720918316>
- Social Blade. (n.d.). *Sekretariat Presiden Youtube Metrics*. <https://socialblade.com/youtube/c/sekretariatpresiden>
- Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). (n.d.). *Portal Data Indonesia*. <http://data.go.id>
- Utama, R. P., Purwandari, B., Satria, R., & Kumaralalita, L. (2019). Open Government Maturity Measurement on Social Media Usage. *Proceedings of the 3rd International Conference on Business and Information Management*, 158–162. <https://doi.org/10.1145/3361785.3361807>
- van Dijck, J., & Poell, T. (2013). Understanding Social Media Logic. *Media and Communication*, 1(1), 2–14. <https://doi.org/10.12924/mac2013.01010002>
- Vicente, M. R., & Novo, A. (2014). An Empirical Analysis of E-participation: The Role of Social Networks and E-government over Citizens' Online Engagement. *Government Information Quarterly*, 31(3), 379–387. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.12.006>
- We Are Social & Kepios. (2022). *Digital 2022 Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- Willis, J. (2007). *Foundations of Qualitative Research: Interpretive and Critical Approaches*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781452230108>
- Zhou, L., & Wang, T. (2014). Social Media: A New Vehicle for City Marketing in China. *Cities*, 37, 27–32. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.11.006>
- Zuiderwijk, A., Helbig, N., Gil-Garcia, J. R., & Janssen, M. (2014). Special Issue on Innovation through Open Data - A Review of the State-of-the-Art and an Emerging Research Agenda: Guest Editors' Introduction. *Journal of theoretical and applied electronic commerce research*, 9(2), 1–2. <https://doi.org/10.4067/S0718-18762014000200001>